

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiroedin Syarif. 1987. *Perundang-undangan Dasar. Jenis dan Teknik Membuatnya*. Jakarta: Bina Aksara.
- Aris Marfai. 2012. *Kerawanan dan Kemampuan Adaptasi Masyarakat Pesisir Terhadap Bahaya Banjir Genangan dan Tsunami*. Yogyakarta: Mizan.
- Eka Mariska. 2012. *Menuju Perubahan Kesiapan Dalam Menghadapi Bencana Alam*. Yogyakarta : Mizan.
- Indiyanto. 2012. *Konstruksi Masyarakat Tangguh Bencana*. Yogyakarta: Mizan.
- Jimly Ashidiqqie, 2010, *Perihal undang-undang*, Jakarta: Raja Grafindo Press.
- Maria Farida, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan*, Yogyakarta. Kanisius.
- Maarif, S. 2013. *Pikiran dan Gagasan: Penanggulangan Bencana di Indonesia*. Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- Muhammad, A. 2013. *Prosiding Workshop Nasional Praktis Cerdas Adaptasi Perubahan Iklim*. Jakarta: Dewan Nasional Perubahan Iklim.
- Nurjanah R. Sugiaharto dkk, 2012. *Manajemen Bencana*, Bandung: Alfabeta Bandung.
- Novianto M. Hantono, 2012. *Sinkronisasi dan Harmonisasi Pengaturan Mengenai Peraturan Daerah , Serta Uji Materi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029*, Jakarta: P3DI Setjen DPR Republik Indonesia dan Azza Grafika, 2012, Halaman 9. Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029, Jakarta: P3DI Setjen DPR Republik Indonesia dan Azza Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Ramli Koehatman. 2010. *Pedoman Praktis Manajemen Bencana*. Jakarta : Dian Rakyat.

Retnowati. 2012. *Menuju Masyarakat Tangguh Bencana*. Jakarta : Mizan.

Robert J.K dan Roestam Sjarief. 2006. *Pengelolaan Bencana Terpadu*. Jakarta : Yarsif Watampone.

Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Cet. Ke-6, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Setyowati,DL dan Nana Karidha Tri Martuti. 2015. *Panduan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Sekolah*. Semarang: CV Swadaya Manunggal.

B. Peraturan Perundang-undangan

TAP MPR Nomor III/MPR/ 2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Undang-Undang Nomor Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil..

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1957 (Lembaran Negara Nomor 160 Tahun 1957) dan Penetapan Keadaan Bahaya

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

C. Jurnal, Skripsi, Tesis, Makalah

Agung Priambodo. 2020. Strategi Komando Resor Militer 043/Garuda Hitam dalam Penanggulangan Bencana Alam di Provinsi Lampung. PERSPEKTIF, vol 9. No 2, hlm. 307

A.Z. Ramayanti, 2014, Peran Desentralisasi Fiskal Dalam Manajemen Bencana di Indonesia, Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, vol 22, No 1. Hlm 35.

Bayu Dwi Anggono, 2010, Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Penanggulangan Bencana, Mimbar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. hlm 373-390.

Heribertus Jaka Triyana, Wibowo, and Richo Andi, 2011, Pelaksanaan Peraturan Partisipasi Masyarakat Dalam Penanggulangan Bencana Gunung Api Merapi, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, vol 3, No 1.

Ishaq. 2020. Metode Penelitian Hukum Penulisan Skripsi Tesis Serta Disertasi, Alfabeta, Bandung, Hal 66.

Made Nurmawati, I Gede Marhaendra Wija Atmaja, Buku Saku Kuliah : Jenis Fungsi dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan Fakultas hukum Universitas Udayana, 2017, Hlm 17.

Maria Farida, Laporan Kompendium Bidang Perundang-Undangan, Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Badan Pembinaan

Hukum Nasional Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, Jakarta, 2008 , Hlm. 1.

Pranoto,S. dkk. 2011. Lesson Learned: Pembelajaran Rehab Rekon Pasca Gempa di Sumatera Barat, 30 September 2009: Building Back Better, Tim Pendukung Teknis Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Padang.

Puteri Hijau. 2021. Jurnal Pendidikan Sejarah, Vol 6, No 2. Hlm 47.

Shanti Dwi Kartika, 2015, *Politik Hukum Penanggulangan Bencana*, Jurnal Kajian Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi/P3DI Sekretariat Jenderal DPR RI, Vol 20, No 4, hlm 329.

Srikandi, A.G. 2004. Humanitarianism and Disaster Governance in Indonesia. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Vol 15, No 3, Hlm 21.

Suhartono, 2011. Harmonisasi Peraturan Peundang-undangan dalam Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara (Solusi Penyerapan Anggaran Belanja Negara yang Efisien, Efektif dan Akuntabel), Tesis, Jakarta: Universitas Indonesia, Hlm 94.

Utomo ,M.H dan Minza,W.N. 2016. Perilaku Menolong Relawan Spontan Bencana Alam. Gajah Mada Journal of Psychology, Vol 2, No 1, hlm. 48.

Yudi Latif, *Negara Paripurna: Sejarah, Rasionalitas dan Aktualitas dari Pancasila*, Gramedia pustaka Utama, Jakarta, 2015, Hlm 1.

D. Website

A.A. Oka Mahendra, Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan, <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/421-harmonisasi-peraturan-perundang-undangan.html>.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Indonesia, <https://nasional.kompas.com/read/2017/12/05/17200331/sepanjang-2017-bnpbmencatat-2175-kejadian-bencana-di-indonesia>.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2015, Statistik Bencana Indonesia 2015,(online), (<http:dibi.bnpb.go.id/>).

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), “Hasil Pertemuan Berkala”, <http://www.bphn.go.id/pusdokinfo/index.php?action=news&id=7>.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, <http://www.bappenas.go.id/unit-kerja/staf-ahli/bidang-sumberdaya-alam-lingkungan-hidup-dan-perubahan-iklim/contents-bidang-sumber-daya-alam-lingkungan-hidupdan-perubahaniklim/2473-telaah-sistem-terpadupenanggulangan-bencana-di-indonesia-kebijakan-strategidan-operasi/>.

Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana http://www.bakornaspb.go.id/irw/benc_m.asp?bid=1.

Eko Teguh Paripurno, Pengurangan Resiko Bencana, <https://www.ashoka.org/id/story/eko-teguh-paripurno-setiap-orang-harus-jadi-agenpengurang-risiko>.

Gempa Bumi Pasaman Barat Tahun 2022, https://jurnal.datadosen.com/Gempa_bumi_Pasaman_Barat_2022.

Israel, B. 2010. Indonesia’s Explosive Geology Explained. Retrieved from <http://www.livescience.com/8823-indonesia-explosive-geology-explained.html>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/indeks.php?option=com_content&view=article&id=1095:refleksi-pengelolaan-bencana-di-indonesia-antara-harapan-dan-realita-suatu-analisis-yuridis&catid=120&itemid=190&lang=en.

Kerugian Gempa Sumatera Barat tahun 2009, <https://www.antaraneews.com/berita/161953/kerugian-gempa-sumbar-rp2158-triliun> diakses tanggal 20 Maret 2023.

Media Indonesia, Peralatan Dini Bencana di Indonesia Masih Minim
<https://mediaindonesia.com/nusantara/187828/indonesia-masih-minim-peralatan-dini-bencana>.

Memori Kolektif Masyarakat dalam Peristiwa Gempa 2009 di Kota Padang,
<https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/ph/article/download/34595/18269>.

Muhammad Yasin, "Regulasi Penanggulangan Bencana Kurang Komprehensif, DPR Usulkan Undang-Undang Baru"
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f360b61bab05/regulasi-penanggulangan-bencana-kurang-komprehensif-dpr-usulkan-undang-undang-baru>.

Akhmad Aulawi, Refleksi Pengelolaan Bencana di Indonesia Antara Harapan dan Realita. 2011.
<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-lingkungan/1095-refleksi-pengelolaan-bencana-di-indonesia-antara-harapan-dan-realita-suatu-analisis-yuridis.html>.

PSHK, Tata Kelola Tumpang Tindih Akibat Penanganan Covid-19 Lambat,
<https://pshk.or.id/publikasi/siaran-pers/tata-kelola-tumpang-tindih-penyebab-penanganan-covid-19-lambat/>.

LIPI. Penanggulangan Bencana Masih Tumpang Tindih.
<http://lipi.go.id/berita/single/Penanggulangan-Bencana-Masih-Tumpang-Tindih/6763>.

Wicipto Setiadi, "Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan"
<http://www.djpp.depukumham.go.id/index.php/harmonisasi-peraturan-perundang-undangan/49-kegiatan-direktorat-harmonisasi>.